



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Jl. Pasir Putih Komplek TPI Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan (22865)

Email : dkp_kabnisel@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat terlaksana sebagaimana mestinya, dan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator pembangunan bidang kelautan dan perikanan kedepannya.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja ini menjadi pedoman bagi unit kerja dan structural Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan untuk dapat melaksanakannya secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada kesempatan ini juga, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak, baik secara internal dan eksternal instansi, atas dukungan dan pendampingan, informasi dan data, serta partisipasi gagasan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini. Semoga kedepan dapat menjadi pedoman pelaksanaan dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan capaian program kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

Teluk Dalam, 31 Juli 2023

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Nias Selatan,



SEKSAMA SARUMAHA, S.IP., MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19700416 198909 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penyusunan Renja	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	36
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan	41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	55
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	57
3.3 Program dan Kegiatan	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61
BAB V PENUTUP	62
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan pedoman dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui perencanaan yang matang diharapkan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terencana, lebih berkualitas serta tepat sasaran sesuai dengan target perencanaan serta memberikan hasil yang memuaskan. Penyusunan perencanaan pembangunan berpedoman pada undang-undang dan peraturan sebagai dasar hukum dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis.

Proses dan tahapan penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja sebagai langkah operasional dari perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang dijabarkan tahunan antara lain dalam penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target sesuai program, kebijakan dan sasaran yang telah direncanakan

dalam satu tahun anggaran serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan Tahun *Ketiga* dari rangkaian Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nias Selatan untuk periode 2021-2026. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 ini juga diharuskan dapat menggambarkan rencana-rencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Bupati Nias Selatan untuk periode 2021-2026 yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dan juga untuk menjaga konsistensi program pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nias Selatan.

Rancangan Renja OPD adalah dokumen Perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini mengacu kepada Kepmendagri Nomor 050-3708/ Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tahapan pelaksanaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja PD ini adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal Renja;
3. Penyusunan rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum OPD;
5. Perumusan rancangan akhir Renja; dan
6. Penetapan Renja.

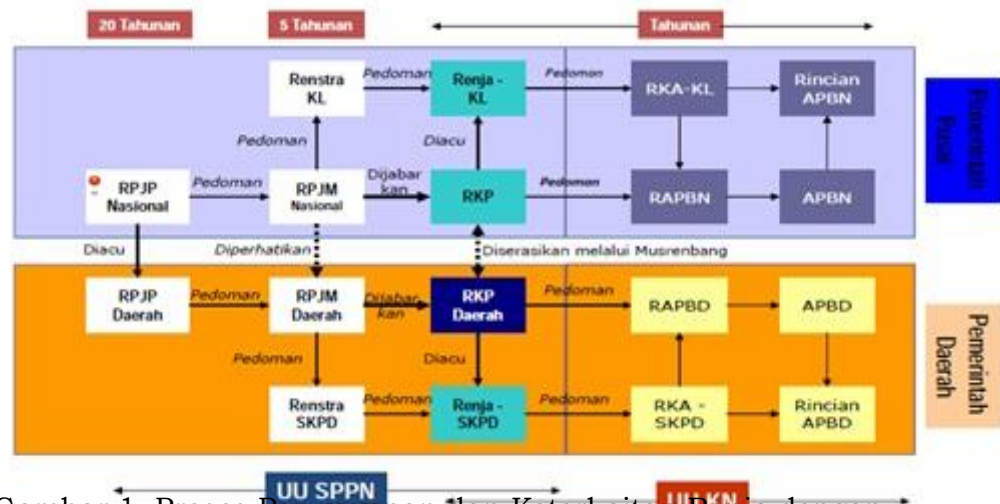
Tahapan persiapan penyusunan Renja meliputi : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja, Orientasi mengenai Rencana Kerja, Penyusunan Agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut : (1) Pengolahan data dan informasi; (2) Analisis gambaran dan informasi; (3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD; (4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD; (5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD; (6) Perumusan tujuan dan sasaran; (7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; (8) Perumusan kegiatan prioritas; (9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD; (10) Penyempurnaan rancangan Renja OPD; (11) Pembahasan Forum OPD; (12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Oleh karenanya Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan tahun lanjutan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan dimana telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan khususnya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sebesar 2,97 - 4,15%, nilai produksi perikanan tangkap sebesar 265 milyar dan nilai produksi perikanan budidaya sebesar 3,5 Milyar.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 Tahun dan Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 5 Tahun. Selanjutnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dijabarkan

berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2024. Secara diagramatis keterkaitan hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.



Gambar 1. Proses Penyusunan dan Keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya.

Mengacu pada Gambar 1 diatas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : Rencana Kerja OPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis OPD dan mengacu pada RKPD. RKPD yang telah disahkan nantinya dijabarkan ke dalam KUA/ PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen RKP dan Renja K/L.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

- tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
 17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;
 18. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 5.1_48 Tahun 2023 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berorientasi kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan di Kabupaten Nias Selatan.

Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berorientasi kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah

hasil perikanan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Penetapan Strategi dan kebijakan umum serta perumusan program dilaksanakan melalui evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan yang berorientasi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan serta masyarakat pesisir dari masing-masing Bidang OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

Bidang-Bidang yang berada dalam lingkup OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan melakukan penelaahan terhadap situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan kelautan dan perikanan yang berorientasi kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan di Kabupaten Nias Selatan, dengan harapan dapat dipilih beberapa lingkungan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan.

Proses Penyusunan Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan ini dilaksanakan melalui pendekatan statistik, *top down* dan *bottom up*, sehingga didalamnya tercantum indikator keluaran, hasil dan manfaat dari pembangunan kelautan dan perikanan yang berorientasi kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.

1.4 Sistemastika Penulisan

Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya;

1.1 Latar Belakang

Uraian pengertian, proses, keterkaitan penyusunan Renja PD terhadap RKPD, Renstra PD, Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta proses penyusunan RAPBD;

- 1.2 Landasan Hukum
Uraian landasan hukum terkait penyusunan Renja perangkat daerah;
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Gambaran maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- 1.4 Sistematisa Penyusunan Renja
Susunan garis besar Renja Perangkat Daerah;

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan serta kaitannya terhadap capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dilengkapi dengan Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dilengkapi dengan Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD dilengkapi dengan Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Kesesuaian usulan dan kaitannya terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dilengkapi dengan Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dilengkapi dengan Tabel T-C.33 Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program/ Kegiatan dan sumber pendanaan perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian atau reviuw terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD Tahun berjalan serta dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun-Tahun sebelumnya.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik global maupun domestik, serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu bagian integral dari Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan menetapkan suatu dokumen rencana lima tahunan guna memberi arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah ke depan yang dituangkan dalam program dan rencana pembangunan lima tahunan. Dokumen rencana pembangunan tersebut adalah Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021.

Pembahasan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2026 (akhir renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
						Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan BMD yang akuntabel dan transparan	%	100	0	100	100	100	100	40	40
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	35	0	2	2	100	7	9	25,7

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	5	0	1	1	100	1	2	40,0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	5	0	1	1	100	1	2	40,0
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	40	0	8	8	100	8	16	40
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Orang	100	0	17	17	100	17	34	34
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Laporan	10	0	2	2	100	2	4	40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan bulanan/ triwulan SKPD yang tersusun	Dokumen	10	0	2	2	100	2	4	40
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan Laporan administrasi Barang milik daerah	Dokumen	20	0	4	4	100	4	8	40
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya dokumen barang milik Daerah pada SKPD									
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	0	100	50	50	100	30	30
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	Paket	5	0	0	0	0	1	1	20

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	14	0	0	0	0	4	4	28,57
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	0	100	85,71	85,71	100	37,142	37,142
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	5	0	1	1	100	1	2	40,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Paket	4	0	1	1	100	1	2	50,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan kebutuhan bahan logistik kantor	Paket	5	0	1	1	100	1	2	40,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Paket	5	0	1	1	100	1	2	40,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan bagi ASN	Dokumen	60	0	0	0	0	12	12	20,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara SKPD	Laporan	60	0	12	12	100	12	24	40,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0,00

3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	15	0	0	0	0	2	2	13,33
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	Unit	5	0	0	0	0	2	2	40,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Laporan	12	0	12	12	100	12	24	200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	0	12	12	100	12	24	40,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	0	12	12	100	12	24	40,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	29	0	4	4	100	9	13	44,83
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	Unit	5	0	1	1	100	1	2	40,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Unit	23	0	3	3	100	5	8	34,78
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara baik	Unit	10	0	1	1	100	2	3	30,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produktifitas perikanan tangkap	Ton/ Tahun	31221	0	8650	8743	101,08	8750	17493	56,03

3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah cakupan kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah yang dikelola	Paket Kegiatan	15	0	5	4	80	5	9	60,00
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Dokumen	5	0	0	0	0	1	1	20,00
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit/ Paket	26	0	4	4	100	5	9	34,62
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit/ Paket	8	0	0	0	0	2	2	25,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha Nelayan kecil yang memperoleh pemberdayaan	Kelompok	125	0	25	23	92	25	48	38,40
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	250	0	0	0	0	0	0	0,00
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	60	0	0	0	0	0	0	0,00

	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	19	0	0	0	0	0	0	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktifitas perikanan budidaya	Ton/ Tahun	225	30	35	79,49	227,11	40	149,49	66,44
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapatkan pemberdayaan	Kelompok	125	0	15	9	60	5	14	11,20
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	45	0	2	2	100	5	7	15,56
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	25	0	5	5	100	5	10	40,00
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	40	0	0	0	0	10	10	25,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan penyediaan data sarpras, lingkungan budidaya dan luas lahan Pemb. Ikan yang dikelola	Laporan Kegiatan	20	0	5	4	80	5	9	45,00

	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0,00
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit/Paket	77	0	8	8	100	20	28	36,36
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit/Paket	62	0	3	3	100	20	23	37,10
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	150	0	0	0	0	0	0	0,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produktifitas Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan	Ton/Tahun	13500	0	2500	2330	93,20	2600	4930	36,52
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapatkan pemberdayaan	Laporan Kegiatan	20	0	0	0	0	4	4	20,00
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton/Tahun	20	0	0	0	0	0	0	0,00
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	115	0	0	0	0	10	10	8,70

Pada tabel ini tampak bahwa pelaksanaan program kerja sejak tahun 2022 sudah menunjukkan konsistensi, hal ini sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dimana program pembangunan Kelautan dan Perikanan yang didanai dari APBD Kabupaten Nias Selatan melalui 3 (tiga) program utama yakni, 1). Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3). Program pengelolaan perikanan budidaya dan, 3). Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Tabel 1. Capaian Tahun 2021 Dan Tahun 2022 Kinerja Utama Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan

No.	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Produksi Perikanan Tangkap	8.600 Ton	8.593 Ton	8.650 Ton	8.743 Ton
2.	Produksi Perikanan Budidaya	10 Ton	41 Ton	35 Ton	70,490 Ton
3.	Nilai produksi perikanan tangkap	245 Milyar	255 Milyar	260 Milyar	252,655 milyar
4.	Nilai produksi perikanan budidaya	2,0 milyar	1,87 milyar	2,5 milyar	2,438 milyar

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Target produksi perikanan tangkap Kabupaten Nias Selatan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 sebesar 8.650 ton. Selama tahun 2022, realisasi produksi perikanan tangkap 8.743 ton atau 101,8 % dari target yang ditetapkan. Untuk nilai produksi perikanan tangkap mencapai 252,655 milyar atau 97% dari target senilai 260 Milyar.

Faktor pendukung Kenaikan produksi perikanan cukup signifikan dan melebihi target yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a) Mulai membaiknya harga beli ikan pasca berakhirnya pembatasan-pembatasan akibat pandemi Covid-19,

sehingga nelayan dan pelaku usaha perikanan dapat kembali menjalankan usahanya.

- b) Kebutuhan produk perikanan yang semakin tinggi menjadi antusias nelayan untuk terus berproduksi.
- c) Mulai membaiknya pendataan produksi perikanan dan pelaku usaha perikanan dengan berbasiskan Validasi Nasional Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memacu setiap OPD penanggung jawab bidang kelautan dan perikanan untuk memaksimalkan inputan data produksi perikanan di daerahnya, sehingga *update* data setiap semesternya rutin dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan menghimpun data melalui kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan.
- d) Dukungan bantuan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada nelayan sangat mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap dan tentunya sangat perlu ditingkatkan pelaksanaannya melalui penambahan anggaran.

Sementara itu, sebagai Faktor capaian peningkatan produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

- a) Sarana dan prasarana nelayan masih tradisional;
- b) Maraknya penangkapan ikan tidak ramah lingkungan;
- c) Kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi jangkauan *fishing trip* nelayan;
- d) Intesitas cuaca buruk selama tahun 2022 mengakibatkan waktu melaut nelayan menjadi terbatas.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Target produksi perikanan budidaya Kabupaten Nias Selatan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 sebesar 35 ton. Selama tahun 2022, realisasi produksi perikanan tangkap 70,490 ton.

Bila dibandingkan dengan target produksi perikanan budidaya tahun 2022, produksi perikanan budidaya terealisasi

melebihi target yang telah ditetapkan dengan angka kenaikan yang sangat signifikan mencapai 201,40%.

Kenaikan signifikan ini tidak semata karena signifikansi produksi. Faktor pendukung capaian ini adalah sebagai berikut :

- a) Membaiknya pendataan produksi perikanan dan pelaku usaha perikanan dengan berbasiskan Validasi Nasional Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memacu setiap OPD penanggung jawab bidang kelautan dan perikanan untuk memaksimalkan inputan data produksi perikanan di daerahnya, sehingga *update* data setiap semesternya rutin dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan menghimpun data melalui kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan. Sehingga pembudidaya ikan yang selama ini tidak terdata pelaku usaha dan produksinya dapat terealisasi.
- b) Selain itu dorongan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari kawasan pesisir meningkat untuk memenuhi kebutuhan pangan (ikan) di wilayahnya.
- c) Beberapa desa mewujudkan program ketahanan pangan dan pemberdayaan melalui kegiatan pembudidayaan ikan pada program kegiatan Dana Desa;
- d) Bantuan program/kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan memberikan dampak peningkatan produksi perikanan budidaya.

Sementara itu, sebagai Faktor capaian peningkatan produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

- a) Tingginya harga pakan mengakibatkan terbatasnya produksi budidaya ikan oleh pembudidaya;
- b) Sistem budidaya ikan masih tradisional dengan alur tahapan budidaya yang tidak sesuai dengan manajemen

aquakultur sebagaimana mestinya;

- c) Minimnya Pengetahuan pembudidaya ikan tentang CPIB dan CBIB.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Produksi hasil olahan produk kelautan dan perikanan adalah menuju Produk Perikanan khas Kabupaten Nias Selatan dengan target produksi hasil olahan produk kelautan dan perikanan pada tahun 2022 yaitu 2.500 Ton dan Terealisasi 2.330 Ton dengan capaian persentase kinerja 93,2 % dan masuk kriteria Sangat Tinggi.

Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Jenis olahan hasil perikanan di Kabupaten Nias Selatan masih didominasi oleh jenis olahan Ikan Kering/Ikan Asin.

Faktor pendukung tercapainya peningkatan produksi olahan hasil perikanan adalah sebagai berikut :

- a) Ketersediaan kebutuhan bahan baku untuk olahan hasil perikanan mencukupi;
- b) Kebutuhan olahan hasil perikanan sangat tinggi peminat, sehubungan dengan daya tahan produk olahan yang lama sehingga dapat dikirimkan di berbagai wilayah non pesisir yang membutuhkan pemenuhan pangan;
- c) Umumnya olahan hasil perikanan di wilayah Kabupaten Nias Selatan tidak menggunakan bahan kimia untuk pengawetan ikan olahan (Produk olahan ikan asin hanya menggunakan garam sebagai bahan pengawet);
- d) Dukungan bantuan sarana penyimpanan ikan sangat mendukung produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

Sementara sebagai Faktor penghambat tercapainya peningkatan produksi olahan hasil perikanan adalah sebagai berikut :

- a) Sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil perikanan masih tradisional;
- b) Kemasan *packaging* produk olahan hasil perikanan yang masih menggunakan bahan sederhana (Karton);
- c) Masuknya produk olahan dari luar daerah Kabupaten Nias Selatan (Sibolga) sangat mengganggu kestabilan harga produk lokal;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Struktur Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar hukum OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan adalah Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikanyang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan,

- penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan

nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- d) Pelaksanaan administrasi dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perikanan;
- b) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris sebagaimana dimaksud dibantu oleh 2 (dua) sub bagian, sebagai berikut:

- 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian perencanaan dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di dinas kelautan dan perikanan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di dinas kelautan dan perikanan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di dinas kelautan dan perikanan;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
 - f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di dinas kelautan dan perikanan;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di dinas kelautan dan perikanan;
 - h. Melakukan penyusunan laporan kinerja di dinas kelautan dan perikanan;
 - i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
2. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, keuangan, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha

menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiunan pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- f. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protocol;
- g. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di dinas kelautan dan perikanan;
- k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di dinas kelautan dan perikanan;
- l. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
- m. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di dinas kelautan dan perikanan;
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dibantu oleh 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

- a) Seksi Diklat Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - b) Seksi Fasilitasi Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
 - c) Seksi Kelembagaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- 4) Bidang Perizinan Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perizinan pembudidayaan ikan.

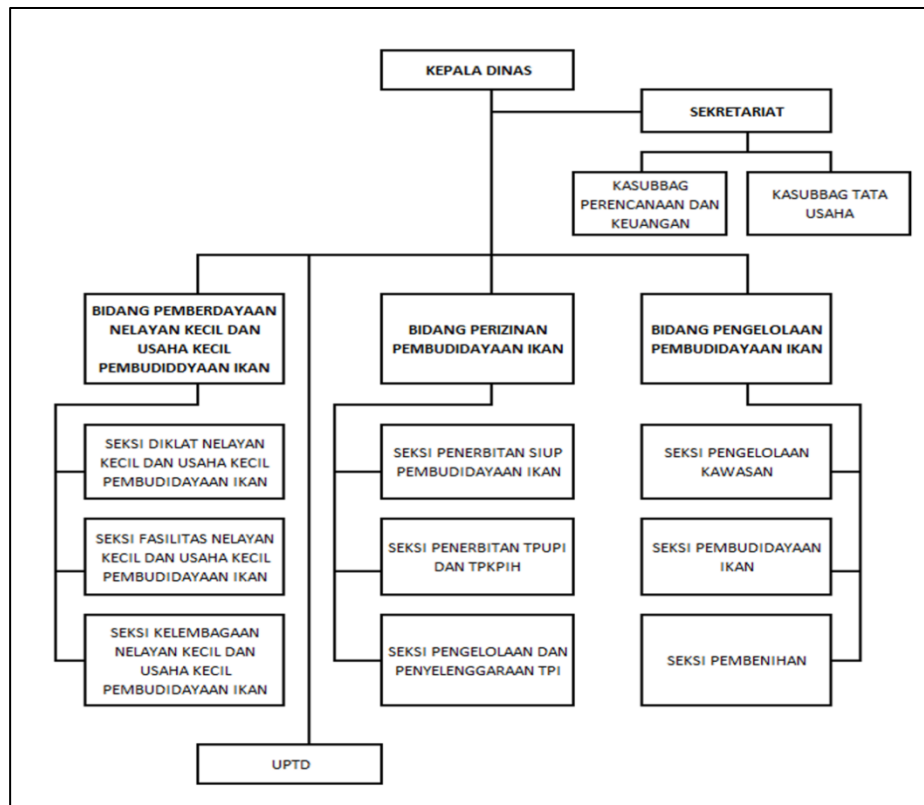
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Bidang Perizinan Pembudidayaan Ikan dibantu oleh 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

- a) Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan;
 - b) Seksi Penerbitan TPUPI dan TPKPIH, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan TPUPI dan TPKPIH;
 - c) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.
- 5) Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pembudidayaan ikan.
- 6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dibantu oleh 3 (tiga) seksi sebagai berikut:
- a) Seksi Pengelolaan Kawasan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.
 - b) Seksi Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;

- c) Seksi Pembenihan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan.



Gambar 2. Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan

b. Sumberdaya Manusia

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia serta

aset/modal yang dimiliki. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2021	11	4	16
2	2022	10	6	16

Pada **Tabel 1.1** di atas dapat diketahui bahwa keadaan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan lebih didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jenjang pendidikan, kondisi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kondisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S2	3	
2	S1	10	
3	Diploma	0	
4	SMA	3	

Berdasarkan pada **Tabel 1.2** di atas dapat diketahui bahwa pendidikan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan sudah baik di mana sebagian besar telah berpendidikan Strata-1. Untuk kondisi pegawai di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kondisi pegawai berdasarkan Golongan.

Golongan	Jumlah		Total
	Laki-laki	Perempuan	
I	0	0	0
II	0	2	2
III	8	4	12
IV	2	0	2

Berdasarkan data pada **Tabel 1.3** di atas, dapat diketahui bahwa pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan sebagian

besar pegawai dengan golongan III. Sementara apabila ditinjau dari hirarki jabatan, keadaan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 4. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan.

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	II.b	1	
2	Sekretaris	III.a	1	
3	Kepala Bidang	III.b	3	
4	Kasubbag/ Kepala Seksi	IV.a	7	
5	Staf	-	4	

Dengan rincian kondisi susunan kepegawaian tersebut sebagaimana diuraikan diatas, dapatlah dijelaskan bahwa sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban terutama dimana masih terdapat jabatan yang belum terisi dan jumlah staf teknis yang belum mencukupi.

c. Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan pencapaian target program dan kegiatan tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Untuk saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan memiliki sarana dan prasarana yang sangat terbatas dalam melaksanakan kegiatannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Kondisi Rill (Buah/Unit)	Kondisi ideal (Buah/unit)
1	Bangunan gedung Kantor	2	3
3	Kendaraan roda 4	1	2
4	Kendaraan roda 2	2	4
5	Kursi kerja staf	20	25
6	Meja staf	12	25
7	Meja eselon II	1	1
8	Meja eselon III	1	4
9	Meja Eselon IV	5	11

10	AC	4	8
11	Komputer PC	7	10
12	Laptop	2	8
13	Filing kabinet	3	5
14	Lemari arsip	7	20
15	Printer	5	10
16	OHP	1	2
17	Kamera	3	5
18	Gedung Aula	0	1
19	Alat Ukur Kualitas Air	0	10

d. Capaian Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal di atas, pengumpulan data kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan. Perolehan data kinerja bersumber dari internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan yang secara sistematis didasarkan pada laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit pelaksana dilingkungannya dan dari eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan seperti Badan Pusat Statistik.

Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya kedua data tersebut selanjutnya diolah dan dirangkum untuk disajikan.

Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 dilakukan dengan

menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada **Tabel T-C.30**.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN RENSTRA	SPM / STANDA R NASIONA L	IKK	SATUA N	TARGET RESNTRA					REALISASI		PROYEKSI		CATAT AN ANALIS IS
					Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	2026	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nilai LAKIP	-	-	Predika t	C	C	B	B	B	B		C	B	
2	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	-	-	%	20	20	20	20	20	20		20	20	
3	Persentase SOP yang Diterapkan	-	-	%	75	100	100	100	100	70		100	100	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	-	-	%	0,61- 1,79	1,79- 2,97	2,97-4,15	4,15-5,33	5,33	Perhitun gan BPS		1,79- 2,97	2,97-4,15	
5	Nilai Produksi perikanan tangkap	-		Rupiah / Milyar	255	260	265	270	275	252,66		260	265	
6	Nilai Produksi perikanan budidaya	-		Rupiah / Milyar	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	2,438		3,0	3,5	
7	Produksi Perikanan tangkap	-	√	Ton/ Tahun	8650	8700	8750	8800	8850	8743		8700	8750	
8	Produksi perikanan budidaya	-	√	Ton/ Tahun	35	40	45	50	55	70,49		80	85	
9	Produktifitas Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan	-	√	Ton/ Tahun	2500	2600	2700	2800	2900	2330		2600	2700	

e. Analisis Capaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan bagian integral dari kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan. Pada Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan melaksanakan beberapa Program kegiatan. Seluruh program dan kegiatan pada tahun 2022 dilaksanakan dengan baik. Realisasi Anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran yang utama adalah kegiatan rutin dan kegiatan kepada masyarakat (khususnya kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan) yang tertuang pada program yang dilaksanakan.

Jumlah Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program-program tersebut adalah **Rp. 2.288.399.590,00-** dengan realisasi sebesar Rp. **2.081.735.511,00** atau sekitar 90,96 %.

Tabel 6. Program, Kegiatan dan Anggaran serta Realisasi Berdasarkan DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	360.081.223	359.983.212	99,72%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	363.042.970	337.852.082	93,61%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.565.275.397	1.383.900.217	88,41%
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0	0	0%
Jumlah		2.288.399.590,00	2.081.735.511,00	90,96%

Jumlah Anggaran dan kegiatan strategis yang ditetapkan dan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai sasaran strategis dipandang cukup efektif dengan memberikan hasil yang baik. Hal ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi pemerintah dan masyarakat

untuk terus saling bekerja sama dan mendukung dalam kemajuan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Utara pada tahun-tahun mendatang.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan merupakan pejabaran Visi, Misi, sasaran, dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 ke dalam strategis pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 yaitu : **“Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”** yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi 1 Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan;
- Misi 2 Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas;
- Misi 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif
- Misi 4 Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif
- Misi 5 Memberi rasa aman dan nyaman ditengah

Berdasarkan kelima misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Nias Selatan, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Nias selatan juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 – 2026 yaitu **“Nias selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”** serta berperan secara aktif dalam misi berikut ini :

- 1) Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan;
- 2) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan urusannya, maka arah pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Arah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 mengacu pada pelaksanaan tahun ketiga Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan serta RPJMD Kabupaten Nias Selatan periode 2022-2026. Rencana pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026 ditujukan dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada **Penurunan Prevalensi Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.**

2. Tantangan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nias Selatan serta periode Tahun 2021 - 2026 antara lain adalah :

Berdasarkan hasil pengkajian data, evaluasi dan analisa serta observasi lapangan dari pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok yang menjadi permasalahan dan membutuhkan pemecahan masalah kedepannya yakni sebagai berikut :

- a. Nomenklatur susunan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 sudah tidak relevan lagi dengan urusan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi nomenklatur kabupaten/kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga beberapa posisi jabatan tidak sesuai dengan program dan kegiatan yang ada.
- b. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil :
 - a) tidak adanya kewenangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pasca terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat melakukan intervensi secara langsung baik

- dalam bentuk penindakan atas pelanggaran pengelolaan SDKP maupun dalam pencegahan berupa penyuluhan dan edukasi;
- b) Minimnya koordinasi lintas stakeholder terkait kerjasama atau dukungan pengawasan SDKP;
 - c) Belum adanya regulasi (Peraturan Daerah) yang mengatur pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d) Masih adanya aktifitas penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (PITRAL) di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Pengelolaan Perikanan Tangkap :
- a) Sarana dan prasarana penangkapan ikan nelayan masih terbatas dan tradisional. Jumlah Kapal perikanan tangkap masih didominasi perahu kecil ukuran <5GT dan alat tangkap tradisional dengan produksi yang masih rendah;
 - b) Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang penangkapan ikan masih terbatas;
 - c) Meningkatnya biaya operasional untuk melakukan penangkapan ikan yang diakibatkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - d) Tidak adanya kantor layanan perizinan dan pendaftaran kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga nelayan dengan kapal penangkap ikan pada ukuran tersebut kesulitan dalam melakukan pengurusan perizinan dan pendaftaran kapal.
- d. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan :
- a) Meningkatnya harga pakan ikan sehingga meningkatkan biaya produksi;
 - b) Belum adanya penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);
 - c) Sarana dan prasarana standard pembudidayaan ikan masih terbatas dengan pembudidayaan ikan yang masih tradisional;
 - d) Sumber induk dan bibit unggul komoditas ikan budidaya masih terbatas;
 - e) Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang pembudidayaan ikan masih terbatas.

- f) Kesulitan layanan Standarisasi manajemen pengelolaan mutu (MPM) oleh pelaku usaha pembudidayaan ikan.
- e. Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan :
 - a) Sarana dan prasarana pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang masih terbatas;
 - b) Tingkat pendidikan dan keterampilan pengolah dan pemasar hasil perikanan masih rendah;
 - c) Layanan pengujian kelayakan produk tidak ada di Kabupaten Nias Selatan;
 - d) Belum optimalnya diversifikasi produk ekspor hasil perikanan Kabupaten Nias Selatan;
 - e) Belum adanya UPI dan supplier memiliki sertifikat kelayakan pengolahan SKP;
 - f) Sebagian besar wilayah pulau-pulau kecil belum memiliki akses listrik sehingga kesulitan dalam melakukan pengawetan produk perikanan dalam bentuk pembekuan/pendinginan.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan :

- a. Meningkatnya produksi perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Nias Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pedagang hasil perikanan di Kabupaten Nias Selatan;
- b. Meningkatnya ekspor hasil perikanan di Kabupaten Nias Selatan;
- c. Meningkatnya konsumsi ikan di Kabupaten Nias Selatan;
- d. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan.

4. Peluang dan tantangan pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

- a. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir
 - Menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
- b. Pengembangan pesisir dan pulau-pulau terluar
 - Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha perikanan,

- terutama khususnya nelayan, pengolah dan pedagang hasil perikanan serta pembudidaya ikan tradisional di kawasan pesisir.
- Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.
 - Memelihara kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan beserta ekosistemnya.
- c. Pengembangan usaha hasil perikanan
- Mengembangkan usaha hasil perikanan yang mampu menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, nilai tambah bagi masyarakat nelayan khususnya dipedesaan, mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - Diversifikasi hasil olahan perikanan;
 - Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan
- d. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
- Terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha bidang kelautan dan perikanan;
 - menjadikan laut sebagai perekat kesatuan dan persatuan NKRI.
- e. Pengembangan Budidaya Perikanan
- Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan;
 - menyediakan induk dan benih unggul;
 - Pencegahan hama penyakit ikan;
 - Restocking perairan umum;
 - pembangunan dan perbaikan dempuk;
 - peningkatan SDM pembudidaya ikan.
- f. Pengembangan perikanan tangkap
- meningkatkan pendapatan nelayan;
 - optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan ;
 - pembangunan dan rehabilitasi Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan lainnya;
 - Pemberdayaan nelayan skala kecil.
- g. Pengembangan perikanan, kelautan dan masyarakat pesisir sebagai berikut :
- meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - meningkatkan nilai rill sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perikanan dan peningkatan peranan produk dan jasa maritim dan kelautan;
 - Meningkatkan peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir, laut dan perairan umum;

- Terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha bidang kelautan dan perikanan;
- Meningkatkan pengendalian sumberdaya perikanan.

5. Formulasi Isu-isu penting

- a. Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023;
- b. Selama Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan daerah capaian kinerja yakni sebagai berikut :
 - Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2022 sebesar 8.743 Ton;
 - Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun 2022 sebesar 70,49 Ton;
 - Produksi Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 sebesar 2.330 ton;
 - Nilai produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 252,655 milyar;
 - Nilai produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 mencapai 2,438 milyar;

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

Tema pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Nias Selatan yang Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing ”** dengan focus kegiatan sebagai berikut :

1. **Penurunan Prevalensi Stunting,** Kandungan gizi ikan, sangat-sangat relevan untuk mendukung program pencegahan stunting, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan akan terus mendukung upaya penanggulangan masalah stunting dimana Angka stunting Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 sebesar 27.2% mengalami penurunan sebanyak 7,2 persen dibanding tahun 2021. Posisi tersebut masih berada di atas angka stunting nasional maupun provinsi. Perlu memaksimalkan implementasi program dan kegiatan penurunan stunting untuk meningkatkan capaian daerah dan nasional. Peningkatan produktifitas perikanan sebagai sumber pangan protein hewani sangat diharapkan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Nias Selatan melalui pemenuhan gizi yang bersumber dari ikan.
2. **Menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrem,** Upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem sudah menjadi agenda prioritas pemerintah, diantaranya melalui program pemberdayaan guna meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Jumlah individu miskin ekstrem pada tahun 2022 di Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 8.792 jiwa menjadi 11.782 jiwa, atau 2,70% menjadi 3,58%. Posisi tersebut lebih tinggi dari angka nasional dan provinsi. Angka kemiskinan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 sebesar 16.48%, mengalami penurunan jika dibanding pada tahun 2021 sebesar 16.92%.

Upaya penanggulangan kemiskinan ektrim ini dapat dilakukan dalam bentuk implementasi program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana nelayan dan pembudidaya ikan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan pembinaan peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan.

Analisis kajian terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan. Kajian ini dimaksudkan untuk menggambarkan skala prioritas primer, sekunder dan

tersier program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan kabupaten nias selatan yang dilaksanakan setiap tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan review ini dimulai dengan merumuskan rencana program dan kegiatan dari masing-masing unit eselon III yang dilanjutkan dengan menjabarkan rumusan rencana program dan kegiatan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka akan diajukan dan untuk disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai Renja Kerja tersebut.

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal SKPD, termasuk dalam hal penganggaran. Tahapan rancangan awal SKPD disajikan dalam **Tabel T-C.31** *Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Nias Selatan* berikut ini.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Nias Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				887.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				651.000.000	
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	6.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	6.000.000	
001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000	
002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
003	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nias Selatan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dokumen	156.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nias Selatan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dokumen	126.000.000	

001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	150.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	120.000.000	
002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.000.000	
003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.000.000	
03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nias Selatan	Persentase Administrasi Kepegawaia Perangkat Daerah	100%	38.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nias Selatan	Persentase Administrasi Kepegawaia Perangkat Daerah	100%	40.000.000	
001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.000.000	
002	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	28.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	30.000.000	

04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nias Selatan	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%	336.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nias Selatan	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%	223.000.000	
001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	
002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	
003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.000.000	
007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	132.000.000	

05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nias Selatan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	15 Unit	70.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nias Selatan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	15 Unit	65.000.000	
001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	45.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	45.000.000	
002	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	10.000.000	
003	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000	
06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nias Selatan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	160.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nias Selatan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	95.000.000	
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	
002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000	
07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nias Selatan	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	29 Unit	121.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nias Selatan	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	29 Unit	96.000.000	
001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	

002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	10.000.000	
003	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000	
004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6.000.000	
005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.335.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				175.000.000	
01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nias Selatan	Jumlah cakupan kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah yang dikelola	5 Paket/ Kegiatan	1.280.000.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nias Selatan	Jumlah cakupan kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah yang dikelola	5 Paket/ Kegiatan	160.000.000	
001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	30.000.000	Prioritas Satu Data KKP
002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3 Unit	1.000.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3 Unit	100.000.000	Prioritas DKP dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2 Unit	250.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2 Unit	30.000.000	Prioritas DKP dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nias Selatan	Jumlah Kelompok Usaha Nelayan kecil yang memperoleh pemberdayaan	25 Kelompok	55.000.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nias Selatan	Jumlah Kelompok Usaha Nelayan kecil yang memperoleh pemberdayaan	25 Kelompok	15.000.000	
001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	50.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	10.000.000	
002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Keci		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	5.000.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Keci		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	5.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.426.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				162.000.000	
01	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Nias Selatan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapatkan pemberdayaan	30 Kelompok	115.000.000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Nias Selatan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapatkan pemberdayaan	30 Kelompok	25.000.000	
001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Keci		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	10.000.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Keci		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	10.000.000	

002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	5.000.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	5.000.000	
003	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	100.000.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	10.000.000	
02	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Nias Selatan	Cakupan penyediaan data, sarana, prasarana, lingkungan budidaya dan luasan lahan Pembudidayaan Ikan yang dikelola	5 Laporan Kegiatan	1.311.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Cakupan penyediaan data, sarana, prasarana, lingkungan budidaya dan luasan lahan Pembudidayaan Ikan yang dikelola	5 Laporan Kegiatan	137.000.000	
001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	Prioritas Satu Data KKP
002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1.000.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	100.000.000	Prioritas DKP dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	250.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	10.000.000	Prioritas DKP dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	10.000.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1.000.000	
005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Orang	1.000.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Orang	1.000.000	
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				50.000.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				12.000.000	
01	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nias Selatan	Cakupan pelaku yang mendapatkan fasilitas penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan	4 Laporan Kegiatan	50.000.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nias Selatan	Cakupan pelaku yang mendapatkan fasilitas penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan	4 Lap. Kegiatan	12.000.000	
001	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha	50.000.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha	12.000.000	Prioritas DKP dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
	Total				3.698.000.000	Total				1.000.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Program dan Kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan senantiasa membuka diri terhadap saran dan masukan dari para *stekholder* terkait pembangunan sektor perikanan, hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk memperoleh program dan kegiatan yang berkualitas serta tepat sasaran.

Dalam merealisasikan hal tersebut tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan selalu berpegangan pada peraturan yang berlaku, dalam aturan yang ada terdapat beberapa mekanisme penyerapan Usulan dan masukan Program/kegiatan diantaranya yaitu usulan langsung oleh masyarakat dengan cara berjenjang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat terendah sampai tertinggi, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD) maupun usulan-usulan *Bottom Up* lainnya seperti permohonan dan Proposal langsung oleh Kelompok Binaan.

Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya secara aktif melakukan koordinasi kepada instansi lain terkait pembangunan sektor perikanan untuk memperoleh informasi aktual yang relevan terhadap pembangunan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini untuk Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2024 sebagaimana terpaparkan pada **Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Nias Selatan** berikut ini.

Tabel T-C.32**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Nias Selatan**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
001	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan Toma; Kecamatan Luahagundre Maniamolo; Kecamatan Fanayama; Kecamatan Amandraya; Kecamatan Pulau-Pulau Batu; Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat; Kecamatan Teluk Dalam; Kecamatan Hibala; Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur; Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	25 KUB	Usulan melalui Musrenbang, Reses DPRD (Pokir) dan Permohonan/Proposal Kelompok Binaan
002	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur; Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat; Kecamatan Somambawa; Kecamatan Teluk Dalam; Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur; Kecamatan Tanah Masa	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20 KUB	Usulan Reses DPRD (Pokir) dan Permohonan/Proposal Kelompok Binaan
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
001	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Susua; Kecamatan Teluk Dalam; Kecamatan Fanayama; Kecamatan Amandraya; Kecamatan O'ou; Kecamatan Onohazumba; Kecamatan Luahagundre Maniamolo	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8 Pokdakan	Permohonan/Proposal Kelompok Binaan

02	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Susua; Kecamatan Onolalu; Kecamatan Idanotae; Kecamatan Fanayama; Kecamatan Somambawa; Kecamatan Onohazumba; Kecamatan O'ou; Kecamatan Mazino; Kecamatan Aramo; Kecamatan Gomo; Kecamatan Teluk Dalam; Kecamatan Luahagundre Maniamolo; Kecamatan Maniamolo	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Pokdakan	Usulan melalui Musrenbang, Reses DPRD (Pokir) dan Permohonan/Proposal Kelompok Binaan
002	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Susua; Kecamatan Onolalu; Kecamatan Idanotae; Kecamatan Fanayama; Kecamatan Somambawa; Kecamatan Onohazumba; Kecamatan O'ou; Kecamatan Mazino; Kecamatan Aramo; Kecamatan Gomo; Kecamatan Teluk Dalam; Kecamatan Luahagundre Maniamolo	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Pokdakan	Usulan melalui Reses DPRD (Pokir) dan Permohonan/Proposal Kelompok Binaan
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
001	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Teluk Dalam; Kecamatan Pulau-Pulau Batu; Kecamatan Hibala; Kecamatan Simuk; Kecamatan Toma; Kecamatan Somambawa	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	15 Pelaku Usaha	Permohonan/Proposal Kelompok Binaan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi OPD maupun lintas OPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi Pembangunan Daerah Bupati terpilih sesuai visi dan misinya juga mengacu pada agenda Pembangunan Nasional (RJPM Nasional) dan Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Perencanaan Daerah Sumatera Utara).

Arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 4) Penguatan daya saing usaha;
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- 7) Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 menetapkan sasaran pembangunan yang mencakup sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi: 5,3%-5,7%;
- b. Tingkat kemiskinan: 6,5-7,5;
- c. Rasio Gini: 0,374;
- d. Indeks Pembangunan Manusia: 70-74;

- e. Nilai Tukar Petani: 108;
- f. Nilai Tukar Nelayan: 107;
- g. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK): 27,27.

Sedangkan Arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan RI adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan PNBPN dari sumberdaya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal;
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. Pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait;
5. Penguatan SDM dan kebijakan kelautan dan perikanan;

Salah satu Tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 sehubungan dengan Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Nias Selatan yaitu : **Terwujudnya perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan**, dengan Sasaran : **Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan.**

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 mencakup Peningkatan Produktifitas perikanan untuk Penurunan Prevalensi Stunting dan Menurunkan Kemiskinan Ekstrem, meliputi :

- 1) Peningkatan daya saing perikanan melalui peningkatan

- produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk;
- 2) Pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan;
 - 3) Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan melalui dukungan sarana dan prasarana;
 - 4) Meningkatkan konsumnsi ikan masyarakat melalui Pemanfaatan potensi perikanan lokal untuk memastikan kecukupan ketersediaan ikan sebagai sumber protein hewani dalam rangka pencegahan/penanggulangan stunting;
 - 5) Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan;
 - 6) Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 7) Koordinasi Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Kebijakan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi OPD maupun lintas OPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja suai dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi Pembangunan.

Berdasarkan Visi misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Nias Selatan, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Nias selatan juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 – 2026 yaitu "Nias selatan Maju, Masyarakat Sejahtera" serta berperan secara aktif dalam misi berikut ini :

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan;
2. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.

Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokoknya membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan. Untuk itu berdasarkan visi dan misi yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021 – 2026 serta sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 , maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7
Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024
1	2	3	4		9
1.	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Nilai LAKIP	Predikat	B
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	Persentase	20
			Persentase SOP yang Diterapkan	Persentase	100
2.	Terwujudnya perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Persentase	2,97-4,15
		Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Nilai Produksi perikanan tangkap	Rupiah/ Milyar	265
			Nilai Produksi perikanan budidaya	Rupiah/ Milyar	3,5

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, kebijakan yang ditetapkan sebagai pedoman dalam operasionalnya sesuai dengan Rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
2. Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan;
3. Mengembangkan potensi perikanan menjadi sektor unggulan ekonomi daerah;

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan maka program strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah;
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
- 2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- 4) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan

Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- 1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
- 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

- 1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil;
- 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
- 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Adapun Tujuan program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - o Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima;
 - o Peningkatan kapasitas sumberdaya ASN;
 - o Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pemerintah;
2. Program pengelolaan budidaya perikanan
 - o Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan air tawar, payau dan laut;
 - o Menyediakan induk dan benih unggul;
 - o Pencegahan hama dan penyakit ikan;
 - o Restocking perairan umum;
 - o Pembangunan dan perbaikan dempon air tawar, payau dan laut;
 - o Perbaikan dan pembangunan saluran irigasi.
3. Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan
 - o Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan;
 - o Diversifikasi hasil olahan perikanan ;
 - o Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.
4. Program Peningkatan Perikanan Tangkap
 - o Meningkatkan pendapatan nelayan;
 - o Meningkatkan produksi perikanan dilaut dan perairan umum;
 - o Meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui asuransi nelayan;
 - o Meningkatkan PAD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Susunan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan mempertimbangkan Arah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 mengacu pada pelaksanaan tahun ketiga Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan serta RPJMD Kabupaten Nias Selatan periode 2021-2026. Rencana pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026 ditujukan dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan daya saing, ketahanan pangan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada **Tabel T-C.33** sebagaimana terlampir.

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan ini merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kecamatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan serta untuk dibahas dalam forum OPD Kabupaten.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan yang memuat rencana dalam kurun waktu satu tahun telah disusun sesuai tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan telah memperhatikan permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi, juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Nias Selatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi, misi yang ditetapkan, ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan yang dihimpun berdasarkan Forum OPD dan Musrenbang, Program dan Rencana Kerja yang dihasilkan melalui Sinkronisasi tersebut dipadukan dan disinkronkan dengan rencana program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang dituangkan dalam Rencana kerja ini.

Program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diupayakan agar terlaksana dengan maksimal berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dan untuk keberhasilan dari program dan kegiatan ini sangat diperlukan

partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dan pada akhir Tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian tujuan, sasaran dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan ini disusun sebagai pedoman Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Teluk Dalam, 31 Juli 2023

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,**



SEKSAMA SARUMAHA, S.IP., MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19700416 198909 1 002

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. NIAS SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.000.000.000,00							5.895.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.000.000.000,00							5.895.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.000.000.000,00							5.895.000.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip OPD Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 Persen B Nilai/ Predikat 100 Persen			B Nilai/ Predikat 100 Persen	651.000.000,00						100 Persen B Nilai/ Predikat 100 Persen	1.125.000.000,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	6.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	ASN	-	12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	ASN		4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	ASN		4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	ASN		4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	126.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	ASN	-	210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	120.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	ASN		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	ASN		4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	ASN		6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Kepegawaia Perangkat Daerah	-			100 %	40.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	ASN	-	55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	ASN		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	30.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	ASN		35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	-			100 %	223.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	ASN	-	468.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	ASN		3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	ASN		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	ASN		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	ASN		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	ASN		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	ASN		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	132.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	ASN		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	-			15 Unit	65.000.000,00			-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	45.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Laporan	95.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-	-	165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	85.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	-			29 Unit	96.000.000,00			-	Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	-	-	165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	-		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	-		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	-		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	6.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	-		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	25.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produktifitas perikanan tangkap	8850 Ton/ Tahun 8850 Ton/ Tahun			8750 Ton/ Tahun	175.000.000,00						8850 Ton/ Tahun 8850 Ton/ Tahun	2.660.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah cakupan kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah yang dikelola	-			5 Paket Kegiatan	160.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Mengembangkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah	Nelayan kecil	-	2.550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Mengembangkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah	Nelayan kecil		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				4 Unit	100.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Mengemba ngkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah	Nelayan kecil		1.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Mengemba ngkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah	Nelayan kecil		1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha Nelayan kecil yang memperoleh pemberdayaan	-			25 Kelompok	15.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Mengemba ngkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah	Nelayan kecil	-	110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				10 Orang	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Mengemba ngkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah	Nelayan kecil		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				5 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Mengemba ngkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah	Nelayan kecil		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktifitas perikanan budidaya Produktifitas perikanan budidaya	15.00 Ton/ Tahun 55 Ton/ Tahun			45 Ton/ Tahun 13.00 Ton/ Tahun	162.000.000,00						15.00 Ton/ Tahun 55 Ton/ Tahun	1.810.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	[deleted] Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapatkan pemberdayaan	-			30 Kelompok	25.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Mengemba ngkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah	Pembudidaya ikan kecil	-	260.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				5 Kelompok	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Mengemba ngkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah	Pembudidaya ikan kecil		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				5 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Mengemba ngkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah	Pembudidaya ikan kecil		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				5 Kelompok	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Mengemba ngkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah	Pembudidaya ikan kecil		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan penyediaan data, sarana, prasarana, lingkungan budidaya dan luasa lahan Pembudidayaan Ikan yang dikelola	-			5 Laporan Kegiatan	137.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Mengembangkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah	Pembudidaya ikan kecil	-	1.550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Mengembangkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah	Pembudidaya ikan kecil		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengembangkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah	Pembudidaya ikan kecil		1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Mengemba ngkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah	Pembudidaya ikan kecil		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Mengemba ngkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah	Pembudidaya ikan kecil		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				5 Orang	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Mengemba ngkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah	Pembudidaya ikan kecil		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produktifitas Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan	2900 Ton/ Tahun 50 RT 72 Kg/ Kapita/ Thn			2700 Ton/ Tahun	12.000.000,00						2900 Ton/ Tahun 50 RT 72 Kg/ Kapita/ Thn	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelaku yang mendapatkan fasilitas penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan	-			4 Laporan Kegiatan	12.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Masyarakat Mengembangkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah	Pengolah dan pemasar hasil perikanan	-	300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				12 Pelaku Usaha	12.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Masyarakat Mengembangkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah	Pengolah dan pemasar hasil perikanan		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	JUMLAH							1.000.000.000,00							5.895.000.000,00	